

**PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN KESEHATAN: PERUMUSAN MASALAH,  
FORMULASI, IMPLEMENTASI, MONITORING, DAN EVALUASI:  
LITERATURE REVIEW**

**HEALTH POLICY FORMULATION PROCESS: PROBLEM FORMULATION,  
FORMULATION, IMPLEMENTATION, MONITORING, AND EVALUATION:  
LITERATURE REVIEW**

**Nathasya Putri Purnama<sup>1</sup>, Reonal Steven Manesanulu<sup>1</sup>, Elisabeth Fransiska Sibarani<sup>1\*</sup>**

**<sup>1</sup>Prodi Administrasi Rumah Sakit STIKES RS Baptis Kediri**

**\*Email: [elisabeth010193@gmail.com](mailto:elisabeth010193@gmail.com)**

**Abstrak**

Studi ini bertujuan untuk menganalisis proses perumusan kebijakan kesehatan. Metode yang digunakan adalah *literature review* dari berbagai sumber, baik dalam bentuk jurnal maupun *e-book* dari tahun 2011 sampai 2021, tingkat nasional maupun internasional. Kebijakan kesehatan adalah suatu rangkaian konsep, asas, ketentuan pokok, dan keputusan yang diambil oleh seseorang atau sekelompok pelaku politik yang menjadi pedoman dan dasar pelaksanaan kegiatan untuk mencapai keadaan seimbang yang dinamis antara fisik, mental, sosial, maupun spiritual yang diindikasikan tidak adanya keluhan ataupun tidak terdapat tanda-tanda penyakit atau kelainan agar masyarakat dapat hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Para ahli membagi proses kebijakan dalam beberapa tahap agar mudah mengkaji kebijakan yang dibuat. Kebijakan kesehatan yaitu tujuan dan sasaran, sebagai instrumen, proses, dan gaya dari suatu keputusan oleh pengambil keputusan, termasuk implementasi, serta penilaian (Lee, Buse, & Fustukian, 2002). Tujuan dari kebijakan kesehatan adalah untuk menyediakan pola pencegahan, pelayanan yang terfokus pada pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, dan perlindungan terhadap kaum rentan (Gormley, 1999). Kebijakan kesehatan mencakup antara lain, kebijakan pembiayaan, kebijakan rumah sakit, kebijakan jaminan kesehatan, kebijakan ibu dan anak, dan kebijakan desentralisasi kesehatan. Namun dapat disimpulkan secara umum tahapan-tahapan proses pembuatan kebijakan kesehatan antara lain adalah perumusan masalah, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dalam pembuatan kebijakan kesehatan, disarankan melakukan pembuatan kebijakan sesuai dengan proses yang ada, agar mendapatkan hasil yang maksimal.

**Kata kunci:** Kebijakan kesehatan, perumusan, implementasi, evaluasi

**Abstract**

*This study aims to analyze the health policy formulation process. The method used is literature review from various sources, both in the form of journals and e-books from 2011 to 2021, at national and international levels. Health policy is a series of concepts, principles, basic provisions, and decisions taken by a person or group of political actors that serve as guidelines and the basis for carrying out activities to achieve a dynamic balance between physical, mental, social and spiritual conditions indicated that there are no complaints or there are no signs of disease or disorders so that people can live productively both socially and economically. Experts divide the policy process into*

*several stages so that it is easy to review the policies made. Health policy is the goals and objectives, as an instrument, process, and style of a decision by decision makers, including implementation, and assessment (Lee, Buse, & Fustukian, 2002). The purpose of health policy is to provide a pattern of prevention, services that focus on health care, treatment of disease, and protection of the vulnerable (Gormley, 1999). Health policies include, among others, financing policies, hospital policies, health insurance policies, maternal and child policies, and health decentralization policies. However, it can be concluded that in general the stages of the health policy-making process include problem formulation, policy formulation, policy implementation, policy monitoring, and policy evaluation. In making health policies, it is recommended to make policies according to the existing process, in order to get maximum results.*

**Keywords:** *Health policy, formulation, implementation, evaluation*

## **Pendahuluan**

Kesehatan adalah suatu keadaan seimbang yang dinamis antara fisik, mental, sosial, maupun spiritual yang diindikasikan tidak adanya keluhan ataupun tidak terdapat tanda-tanda penyakit atau kelainan sehingga memungkinkan untuk hidup produktif baik secara sosial maupun secara ekonomi. Maka, kebijakan kesehatan adalah suatu rangkaian konsep, asas, ketentuan pokok, dan keputusan yang diambil oleh seseorang atau sekelompok pelaku politik yang menjadi pedoman dan dasar pelaksanaan kegiatan untuk mencapai keadaan seimbang yang dinamis antara fisik, mental, sosial, maupun spiritual yang diindikasikan tidak adanya keluhan ataupun tidak terdapat tanda-tanda penyakit atau kelainan agar masyarakat dapat hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomi.

Tahapan kebijakan kesehatan adalah keseluruhan pola dalam pembuatan kebijakan kesehatan yang melibatkan hubungan masalah, perumusan, implementasi, dan evaluasi dampaknya terhadap masyarakat. Tahapan kebijakan kesehatan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses dengan berbagai variabel yang harus dikaji. Tahapan kebijakan kesehatan melibatkan berbagai unsur, antara lain adalah eksekutif, legislatif, forum media massa, para ahli, akademisi, dan para praktisi di bidang kesehatan.

Secara umum tahapan-tahapan proses pembuatan kebijakan kesehatan antara lain adalah perumusan masalah, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait proses perumusan kebijakan kesehatan. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis proses perumusan kebijakan kesehatan.

## **Metodologi Penelitian**

Analisis proses perumusan kebijakan kesehatan ini menggunakan metode *literature review* dari berbagai sumber, baik dalam bentuk jurnal maupun *e-book* dari tahun 2011 sampai 2021, tingkat nasional maupun internasional.

## Hasil

**Tabel 1. Tabel Ekstrasi**

Autor	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Database dan Reputasi
Kus Winarno, dkk (2013)	Evaluasi Kebijakan Pembangunan Puskesmas Pembantu di Propinsi Kalimantan Tengah	<b>Jenis:</b> Deskriptif <b>Sampel:</b> <i>Stakeholder</i> terpilih, pada level provinsi (DPRD yang membidangi masalah perencanaan dan penganggaran, Kepala Dinkes provinsi, Kasubdin Bina Pelayanan Kesehatan Dinkes provinsi, Kasubdin Bina Program Dinkes Provinsi Kalimantan Tengah, dan Ketua Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah), dan di tingkat kabupaten (Kepala Dinkes kabupaten terpilih, Kepala seksi perencanaan dan Kepala Bappeda kabupaten, dan Kades atau tokoh masyarakat) <b>Analisis:</b> Data Kualitatif	Masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan adalah monitoring, rekanan tidak melapor, lokasi sangat jauh, satuan harga tidak sama, pemenuhan tenaga, dan peralatan tidak sesuai dengan tenaga. Evaluasi dilaksanakan hanya menyangkut masalah kemajuan fisik. Secara umum, terjadi peningkatan alokasi dana DAK di masing-masing kabupaten/kota.	<b>Jurnal:</b> Kebijakan Kesehatan Indonesia <b>Volume:</b> 02 no 2 tahun 2013 hlm 86-94 <b>ISSN:</b> -
Elisabet Bre Boli (2020)	Analisis Kebijakan Gizi dalam Upaya Penanganan Masalah Gizi di Provinsi Nusa Tenggara Timur	<b>Jenis:</b> Deskriptif eksploratif <b>Sampel:</b> Informan kunci (4 staf Dinkes Provinsi NTT, 2 staf Bappeda Provinsi NTT, dan 1 anggota komisi V DPRD Provinsi NTT) <b>Analisis:</b> Kualitatif	Perumusan kebijakan gizi sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur. Tahapan implementasi menunjukkan adanya kekonsistensian antara program gizi dan kegiatan di Dinkes Kabupaten Manggarai dan Sikka, dan Puskesmas di kedua kabupaten dengan Dinkes provinsi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 3 indikator dari 9 indikator proses telah mencapai target dan prevalensi <i>underweight</i> berfluktuasi tetapi mencapai target yang direncanakan oleh Dinkes Provinsi NTT.	<b>Jurnal:</b> Komunitas Kesehatan Masyarakat <b>Volume:</b> 2 no 1 tahun 2020 hlm 23-30 <b>ISSN:</b> -
Rini Pratiwi, dkk (2013)	Analisis Formulasi dan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif di Kabupaten Klaten	<b>Jenis:</b> Kualitatif <b>Sampel:</b> 9 orang <i>stakeholder</i> terpilih (Kepala Dinkes tahun 2008 dan 2011, Kabidkesmas, Ketua Komisi 4 DPRD Klaten, Ketua Pansus Perda IMD dan ASI Eksklusif, Kabagkum, Ketua IBI wilayah Klaten, Ketua PKK, dan ibu rumah tangga) <b>Analisis:</b> Analisa Deskripsi ( <i>content analysis</i> )	Proses formulasi kebijakan diawali dengan membuat masalah publik menjadi <i>issue</i> dengan sosialisasi kepada tenaga kesehatan dan masyarakat serta melakukan promosi ke sejumlah media massa. Implementasi Perda IMD dan Asi Eksklusif telah berjalan dengan adanya kelompok pendukung ASI, dicanangkannya 4 Kecamatan Sayang Bayi, tidak ada sponsor susu formula dalam kegiatan kesehatan, bendera hitam di depan BPS yang tidak mematuhi Perda, dan adanya dukungan RS menjadi pusat rujukan laktasi.	<b>Jurnal:</b> Ilmiah Kesehatan <b>Volume:</b> 8 no 2 tahun 2013 hlm 1-17 <b>Print ISSN:</b> 1907-3887 <b>e-ISSN:</b> 26851156

Autor	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Database dan Reputasi
Fachry Yophy Bashofy, dkk (2015)	Perumusan Kebijakan Pemerintah Desa (Studi Keberpihakan Perumusan RKPDesa dan ABPDesa terhadap Masyarakat Miskin Tahun 2013 di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember)	<b>Jenis:</b> Deskriptif <b>Sampel:</b> 8 <i>key informants</i> (informan inti dan tambahan) <b>Analisis:</b> Model analisis Interaktif Miles dan Huberman	Penyusunan rencana kerja pemerintah desa dan anggaran Desa Mumbulsari tahun 2013 tentang pemilihan alternatif dan penetapan kebijakan tidak sejalan dengan masyarakat miskin dan pertemuan tahunan kabupaten tidak diadakan.	<b>Jurnal:</b> Ilmu Administrasi Negara <b>Volume:</b> 1 no 1 tahun 2015 hlm 1-12 <b>ISSN:</b> -
Sri Widi Astuti (2017)	Analisis Proses Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Instalasi Gawat Darurat di RSUD dr. R. Soetijono Blora	<b>Jenis:</b> Deskriptif Kualitatif <b>Sampel:</b> Informan utama (Kepala Ruang dan Kepala IGD) dan informan triangulasi (Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala KMKP, Kepala PI, dan pasien/keluarga penunggu pasien IGD) <b>Analisis:</b> P1-P2-P3theory	Dalam proses perencanaan, SPM belum dipersiapkan dengan baik sesuai standar yang ditetapkan karena mengejar PSB persyaratan. Proses implementasi belum optimal sehingga indikator SPM yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2010 belum semuanya terpenuhi.	<b>Jurnal:</b> Kesehatan Masyarakat <b>Volume:</b> 5 no 4 tahun 2017 hlm 137-144 <b>ISSN:</b> 2356-3346

## Pembahasan

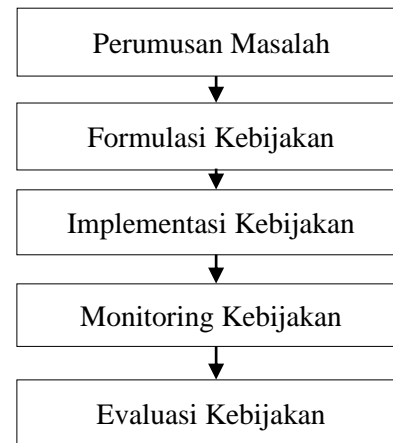
Para ahli membagi proses kebijakan dalam beberapa tahap agar mudah mengkaji kebijakan yang dibuat. Beberapa pendapat dari para ahli mengenai tahapan dalam pembuatan suatu kebijakan adalah sebagai berikut. (Jasmen Manurung, dkk, 2021: 6)

1. Menurut James Anderson, tahapan-tahapan dalam pembuatan kebijakan adalah formulasi masalah, formulasi kebijakan, penentuan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.
2. Menurut Patton dan Savicky, tahapan-tahapan dalam pembuatan kebijakan adalah mendefinisikan masalah (*define the problem*), menentukan kriteria evaluasi (*determine evaluation criteria*), mengidentifikasi alternatif kebijakan-kebijakan (*identify alternative policies*), mengevaluasi alternatif kebijakan-kebijakan (*evaluate alternative policies*), menyeleksi kebijakan-kebijakan terpilih (*select preferred policy*), dan menerapkan kebijakan-kebijakan terpilih (*implement the preferred policy*).
3. Menurut Thomas R. Dye, tahapan-tahapan dalam pembuatan kebijakan adalah identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*), pengaturan agenda (*agenda setting*), perumusan kebijakan (*policy formulation*), pengesahan kebijakan (*policy legitimation*), pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*), dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*).

4. Menurut James Anderson, David W. Brady, dan Charles Bullock III, tahapan-tahapan dalam pembuatan kebijakan adalah agenda kebijakan (*policy agenda*), perumusan kebijakan (*policy formulation*), penetapan kebijakan (*policy adoption*), pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*), dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*).
5. Menurut AG. Subarsono, tahapan-tahapan dalam pembuatan kebijakan adalah penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.
6. Menurut Randal B. Ripley, tahapan-tahapan dalam pembuatan kebijakan adalah *agenda setting, formulation and legitimation of goals and programs, program implementation, and evaluation of implementation*.
7. Menurut James P. Lester dan Joseph Stewart Jr., tahapan-tahapan dalam perumusan kebijakan adalah agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, perubahan kebijakan, dan terminasi kebijakan.
8. Menurut Herbert A. Simon, tahapan-tahapan dalam perumusan kebijakan adalah inteligensi, desain, dan pilihan.
9. Menurut Harold D. Lasswell, tahapan-tahapan dalam perumusan kebijakan adalah inteligensi, promosi, preskripsi, invocation (perujukan ke kebijakan yang lebih tinggi), aplikasi, terminasi (penghentian), serta evaluasi (*appraisal*).
10. Sedangkan menurut R. Mack, tahapan-tahapan dalam perumusan suatu kebijakan adalah memutuskan untuk menetapkan (pengenalan problem), merumuskan alternatif dan kriteria pemilihan, menentukan keputusan yang terbaik, melahirkan akibat kebijakan (*effectuation*), serta

koneksi dan penambahan (*supplementation*).

Jadi, secara umum tahapan-tahapan proses pembuatan kebijakan kesehatan adalah sebagai berikut (Jasmen Manurung, dkk, 2021: 7).



#### 1. Perumusan Masalah

Perumusan kebijakan adalah upaya untuk merumuskan apa sebenarnya masalah yang akan diatasi (Jasmen Manurung, dkk, 2021: 7). Contohnya dalam sebuah jurnal tentang masalah IMD dan ASI eksklusif, upaya dalam menggiring masalah untuk kemudian menjadi *issue*, Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tenaga kesehatan. Selain melakukan sosialisasi, Dinkes juga melakukan promosi ASI eksklusif ke berbagai media massa.

Raperda yang telah disusun oleh Dinkes diajukan kepada bagian hukum untuk kemudian dilakukan konsultasi publik. Perumusan Raperda dilakukan dengan memperhatikan hasil konsultasi publik untuk dimatangkan sebelum diajukan kepada Badan Musyawarah (Banmus). Dalam Banmus ini akan ditentukan prioritas pembahasan oleh Dewan. Prioritas pembahasan ini akan masuk dalam Program

Legislasi Daerah (Prolegda). Jika Raperda telah masuk ke dalam Prolegda, maka Raperda telah masuk dalam prioritas pembahasan. Sehingga pembahasan Raperda bisa segera dilaksanakan. (Rini Pratiwi, dkk, 2013: 10)

Perumusan kebijakan ini juga dapat diartikan sebagai proses perencanaan. Dalam perencanaan, terdapat 3 aspek pokok yang harus diperhatikan, yaitu hasil dari pekerjaan perencanaan (*outcome of planning*), perangkat organisasi yang dipergunakan untuk melakukan pekerjaan (*mechanic of planning*), serta langkah-langkah atau proses melakukan pekerjaan perencanaan (*process of planning*). (Sri Widi Astuti, dkk, 2017: 138)

## 2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan adalah upaya atau tahap menjadikan masalah atau isu menjadi sebuah agenda pemerintah yang dalam bentuk hukum publik (Jasmen Manurung dkk, 2021:7). Dalam tahap ini juga mengeksplorasi siapa saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan, bagaimana kebijakan tersebut disepakati, dan bagaimana akan dikomunikasikan (Jasmen Manurung, dkk, 2021: 22).

## 3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah upaya untuk melaksanakan kebijakan (Jasmen Manurung dkk, 2021: 7). Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar sebuah kebijakan mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. (Kus Winarno, dkk, 2013: 88) Proses implementasi kebijakan tidak dapat berjalan lancar apabila lebih dominannya faktor yang

kurang mendukung dalam proses tersebut (Kus Winarno, dkk, 2013: 92).

Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut. Penetapan kebijakan dapat berupa undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan-keputusan menteri, dan lain sebagainya. Kebijakan ditetapkan bertujuan yang nantinya kebijakan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. (Fachry Yophy Bashofy, dkk, 2015: 6).

Dalam proses implementasi banyak aktor yang terlibat dalam penentuan pilihan-pilihan mengenai alokasi sumber publik tertentu serta banyak pihak yang berusaha untuk mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. Apakah aktor-aktor tersebut akan terlibat secara intens atau tidak akan ditentukan oleh muatan program dan bagaimana bentuk pengadministrasiannya. (Kus Winarno, dkk, 2013: 92).

Tahap ini seringkali diabaikan, namun demikian merupakan fase yang sangat penting dalam membuat suatu kebijakan, karena apabila kebijakan tidak diimplementasikan maka dapat dianggap keliru (Jasmen Manurung, dkk, 2021:22).

## 4. Monitoring Kebijakan

Monitoring kebijakan adalah upaya yang dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan atau implementasi kebijakan (Jasmen Manurung, dkk, 2021: 8). Pada dasarnya, pengawasan merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam kehidupan organisasi untuk menjaga agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Fungsi monitoring ini adalah untuk mencegah

penyimpangan (protektif), meluruskan penyimpangan (kuratif), dan membimbing pegawai agar tidak menyimpang (preventif).Aspek yang perlu diperhatikan dalam fungsi ini adalah objek, metode, dan proses (Sri Widi Astuti, dkk, 2017: 142).

#### 5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah upaya untuk menilai perbedaan keadaan sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan(Jasmen Manurung, dkk, 2021: 8).Dalam mengevaluasi suatu kebijakan, ada beberapa indikator yang perlu digunakan, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan (Kus Winarno, dkk, 2013: 88).

Tahapan ini juga dapat dikatakan bahwa dimana diidentifikasi apa saja yang termasuk hal-hal yang muncul dan tidak dapat diharapkan dari suatu kebijakan ((Nugrohu, 2003) dalam (Jasmen Manurung, dkk, 2021: 23)).Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesehatan dapat dilakukan dengan melihat indikator sasaran dan indikator hasil (Elisabet Bre Boli, 2020: 27).Contohnya adalah penurunan kasus gizi kurang pada balita.

### Kesimpulan

Tahapan proses pembuatan kebijakan kesehatan ada 5 yaitu:

1. Perumusan masalah kebijakan, adalah upaya untuk merumuskan apa sebenarnya masalah yang akan diatasi.
2. Formulasi kebijakan, adalah upaya atau tahap menjadikan masalah atau isu menjadi sebuah agenda pemerintah yang dalam bentuk hukum publik.
3. Implementasi kebijakan, pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar sebuah kebijakan mencapai tujuannya

4. Monitoring kebijakan, adalah upaya yang dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan atau implementasi kebijakan.

5. Evaluasi kebijakan, adalah upaya untuk menilai perbedaan keadaan sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan.

### Saran

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dalam pembuatan kebijakan kesehatan, disarankan mengikuti dan memahami setiap tahapan proses pembuatan kebijakan yang ada. Selain itu, di setiap tahapan proses pembuatan kebijakan seharusnya dilakukandengan sebaik mungkin. Dengan demikian,dapat menghasilkan kebijakan kesehatan yang diharapkan.

### Daftar Pustaka

- Dachi, Rahmat Alyakin. (2017). *Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan*. Sleman: Deepublish.[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=NINBDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=+proses+perumusan+kebijakan+kesehatan&ots=NsSK\\_fEYeU&sig=JE6LZLmIAdekWcOSyZtBN7\\_t95g&redir\\_esc=y#v=onepage&q=proses%20perumusan%20kebijakan%20kesehatan&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=NINBDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=+proses+perumusan+kebijakan+kesehatan&ots=NsSK_fEYeU&sig=JE6LZLmIAdekWcOSyZtBN7_t95g&redir_esc=y#v=onepage&q=proses%20perumusan%20kebijakan%20kesehatan&f=false)
- Winarno, Kus, Mubasysyir Hasanbasri, Deni Kurniadi Sunjaya. (2013). “Evaluasi Kebijakan Pembangunan Puskesmas Pembantu di Propinsi Kalimantan Tengah”. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*. 2(2) 86-94. <https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/54045/IDL-54045.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Manurung, Jasmen, Vina Novela, Qonita Ulfiana, Janner Pelanjani Simamora, Niken Bayu Argaheni, Efendi Sianturi, Rahmat Haji

- Saeni, Lakhmudien. (2021). *Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Yayasan Kita Menulis. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=CJ9EEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=+proses+perumusan+kebijakan+kesehatan&ots=U1mBcn6lAt&sig=HNmBikMzjeQIPdNST0vQHU7nUM&redir\\_esc=y#v=onepage&q=proses%20perumusan%20kebijakan%20kesehatan&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=CJ9EEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=+proses+perumusan+kebijakan+kesehatan&ots=U1mBcn6lAt&sig=HNmBikMzjeQIPdNST0vQHU7nUM&redir_esc=y#v=onepage&q=proses%20perumusan%20kebijakan%20kesehatan&f=false)
- Boli, Elisabet Bre. (2020). “Analisis Kebijakan Gizi dalam Upaya Penanganan Masalah Gizi di Propinsi Nusa Tenggara Timur”. *Jurnal Komunitas Kesehatan Masyarakat*. 2(1) 23-30. <https://uit.ejournal.id/JKKM/article/view/749/638>
- Pratiwi, Rini, Chriswardani S, Septo P. Arso. (2013). “Analisis Formulasi dan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif di Kabupaten Klaten”. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*. 8(2) 1-17. <http://medika.respati.ac.id/index.php/Medika/article/view/91>
- Bashofy, Fachry Yophy, Anastasia Murdyastuti, M. Hadi Makmur. (2015). “Perumusan Kebijakan Pemerintah Desa”. *Jurnal Ilmu Administrasi*. 1(1) 1-12. <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/71593/Fachry%20Yophy%20Bashofy.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Astuti, Sri Widi, Septo Pawelas Arso, Eka Yunila Fatmasari. (2017). “Analisis Proses Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Instalasi Gawat Darurat di RSUD dr. R. Soetijono Blora”. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 5(4) 137-144. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/18327>